



HAMBA TUHAN DAN POLITIK PRAKTIS: KAJIAN TEOLOGIS-ETIS TERHADAP PANGGILAN HAMBA TUHAN DAN KETERLIBATANNYA DALAM POLITIK PRAKTIS DALAM KONTEKS INDONESIA

Gianto^{1✉},

Sekolah Tinggi Teologi Injili Arastamar (SETIA) Ngabang ⁽¹⁾

DOI: -

✉ Corresponding author:

[berianasimorangkir@gmail.com]

Article Info

Abstrak

Kata kunci:
Politik Pkraktis 1;
Hamba Tuhan 2;
Teologi-Etis 3;

Cukup menarik untuk mencermati mengapa para rohaniwan sekarang ini berminat terjun dalam politik praktis. Di kalangan Islam, misalnya, ditemukan Kiai-kiai yang mendirikan partai-partai politik. Bahkan mencalonkan diri menjadi eksekutif atau pun legislatif. Kenyataan itu mestinya menjadi alasan untuk mempertanyakan secara mendalam alasannya, mengapa mereka harus terlibat

Keywords:
Practical Politics 1;
Servant of God 2;
Theology-Ethical 3;

Abstract

It is quite interesting to see why the clergy today are interested in engaging in practical politics. In Islamic circles, for example, there are kiai who have founded political parties. They even run for executive or legislative positions. That fact should be a reason to deeply question the reason, why they should be involved

1. PENDAHULUAN

Tahun-tahun terakhir ini semakin banyak orang menyadari bahwa politik merupakan hal yang melekat pada lingkungan hidup manusia. Politik hadir di mana-mana. Sadar atau tidak, mau atau tidak, politik ikut mempengaruhi kehidupan manusia sebagai individu maupun sebagai bagian dari kelompok masyarakat, demikian halnya dalam kehidupan kekristenan. Hal itu berlangsung sejak kelahiran sampai dengan kematian, tidak peduli apakah seseorang ikut mempengaruhi proses politik atau tidak? Karena politik mempengaruhi kehidupan semua orang.

Politik adalah aktivitas yang diijinkan Tuhan. Meskipun demikian, ada yang berpendapat bahwa Politik itu kotor. Oleh karena itu, Pandangan bahwa politik itu kotor, perlu diluruskan dalam pemahaman umat. Politik itu netral, hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan. Politik dari kata polis berarti negara/kota, polites (warga negara), politikos (kewarganegaraan, civics), politiketechne (kemahiran berpolitik), dan politike episteme (ilmu politik). Politik adalah seni kemungkinan dalam mengatur warga kota/Negara.

Salah satu tugas warga negara yang baik adalah melakukan pendidikan politik. Pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimana kita mau memperjuangkan hak kita, jikalau kita sendiri tidak mengetahui apa yang menjadi hak kita? Melalui partai politik, kita mengetahui apa saja hak kita dan berani memperjuangkannya secara legal. Apabila diperhatikan tujuan dan fungsi partai politik, maka kita tidak akan "negative thinking" terhadap pendeta yang berpolitik praktis. Tujuan partai politik, Pasal 10 UU No. 2 Tahun 2008, yaitu: mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tugas khususnya adalah meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan; memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tujuan Partai Politik ini diwujudkan secara konstitusional atau sesuai aturan. Adapun fungsi Partai Politik adalah berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat; penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara; partisipasi politik warga negara Indonesia; dan rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Jadi, alat itu (politik) memang bisa kotor jika pemakainya (orang yang berpolitik) menggunakannya dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan kebenaran. Ibaratnya, politik itu seperti alat pisau bedah di tangan dokter bedah. Pisau itu justru bisa mengeluarkan penyakit dan menyelamatkan seseorang. Sebaliknya, pisau itu dapat digunakan mengancam, menodong, bahkan membunuh bila berada ditangan penjahat. Kita menginginkan pisau itu berada ditangan siapa?

Disinilah, peranan Gereja dibutuhkan. Perlu ada pendidikan Politik. Sayangnya, menurut Daulay, "masih banyak warga gereja –termasuk mereka yang berpendidikan, bahkan mereka yang menyebut dirinya politis– yang belum memahami sejauh mana, dan dalam bentuk apa Gereja (sebagai institusi) bisa terlibat dalam urusan Negara (baca: berpolitik)". Padahal, walau Gereja bukanlah organisasi politik, tetapi Gereja adalah bagian dari polis (kota) atau Negara. Dan dalam Yeremia 29: 7, tertulis; "Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu Aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu."

Itu artinya bahwa, Orang Kristen boleh berpartisipasi/terlibat dalam tata kelola sebuah kota; bahkan bangsa-Negara. Dengan kata lain, tidak alergi dengan politik. Tentu, keterlibatan orang Kristen dalam Politik, harus dibedakan dalam dua kelompok, yakni: kaum awam, dan rohaniawan (hamba Tuhan). Jika, yang terlibat adalah kaum awam tentu tidak dipermasalahkan. Namun, permasalahannya adalah keterlibatan seorang Hamba Tuhan dalam politik. Oleh karena itu, perlu ada batasan sampai sejauh mana keterlibatan Seorang Hamba Tuhan (baca: Pendeta) dalam Politik? Atau boleh tidak seorang Pendeta menjalankan peran partisipasi politik Kristen? Atau dengan kata lain, boleh tidak seorang Pendeta terlibat dalam politik praktis? Cukup menarik untuk mencermati mengapa para rohaniawan sekarang ini berminat atau diminati dalam bidang politik praktis. Dikalangan islam misalnya, dapat ditemukan kiai-kiai yang mendirikan partai-partai politik, bahkan mencalonkan diri menjadi Presiden. Kenyataan itu mestinya menjadi alasan untuk mempertanyakan secara mendalam alasannya. Mungkinkah para politisi yang professional sedang mengalami penurunan kredibilitas dengan menilik kinerja dan penampilan mereka yang kurang memperhatikan kesejahteraan rakyat? Adakah perjuangan mereka menegakkan keadilan, memberantas KKN, yang tidak terlalu berkesan di mata rakyat? Lalu karena kenyataan-kenyataan itu rakyat tidak lagi percaya kepada siapapun, kecuali para rohaniawan? Mereka diasumsikan masih suci mampu bersikap adil dan benar, dan bebas dari pengaruh KKN, sehingga pantas untuk dicalonkan?

Masalah Hamba Tuhan (lihat pendeta) dalam dunia politik praktis bukan terutama masalah doktrin jabatan menyangkut salah atau benar; melainkan masalah etika, boleh atau tidak boleh. Pasalnya, Pendeta yang berpolitik akan cenderung mengarahkan warga jemaat pada kepentingan partai atau politiknya, dan dengan demikian tidak netral. Bahkan dapat memakai mimbar gereja untuk kampanye politik, bukan pemberitaan Injil. Selain itu, yang juga penting adalah motivasi pendeta terjun dalam politik praktis. Dan dalam praktiknya keterlibatan seorang Pendeta dalam politik praktis, ditentukan oleh pengaturan gerejanya.

Tetapi, bagaimana pun, pada prinsipnya pilihan adalah menjadi pendeta atau menjadi politikus, membawa pada situasi dilematis. Antara, melayani "ideologi Kerajaan Allah" atau tunduk pada ideologi partai politiknya.

Seringkali kita meng-apatiskan dan meng-alienasi pendeta dari partai politik. Apalagi bila ada yang merasa terancam posisi politiknya bila pendeta juga masuk politik. Kita harus mengetahui apa itu partai politik, tidak serta merta memandangnya secara negatif.

Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Partai Politik merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi untuk menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab. Kita sering menyerukan demokrasi, dan partai politiklah tempat kita mengembangkan sikap demokrasi itu. Kita sering berteriak: "kebebasan beribadah", dan melalui partai politiklah kita bisa menyalurkan itu secara bertanggungjawab. Secara bertanggungjawab disini diartikan sesuai mekanisme atau aturan yang ada.

Fungsi Partai Politik diwujudkan secara konstitusional atau sesuai aturan yang berlaku. Sebagai negara yang menganut sistem perwakilan, maka kita perlu mendukung siapapun yang bisa mengabarkan injil melalui sistem partai politik dan DPR/DPRD. Apabila kita mempercayai pendeta, maka kita (anggota jemaat biasa) harus berbesar hati memberi kesempatan kepada pendeta untuk menyatakan karya Allah melalui politik. Ingatlah, tidak semua orang masuk partai politik atau DPR/DPRD karena faktor kekuasaan atau uang. Ada juga yang masuk partai politik dan menjadi anggota DPR/DPRD karena faktor pelayanan. Pelayanan kepada Allah dan sesama manusia. Pelayanan secara cerdas dan konstitusional. Dunia politik membutuhkan kebenaran. Bagaimana kebenaran itu dinyatakan bila tidak ada yang menyampaikannya? Dunia politik tidak bisa dipisahkan, dikotomi, dari dunia gerejawi. Kita harus mengakui bahwa dunia politik juga adalah medan pelayanan, sebagaimana diakui oleh Gereja.

Disinilah kita menemukan perdebatan antara yang mendukung dan menolak keterlibatan hamba Tuhan dalam politik praktis. Melihat realitas yang ada sekarang ini, dimana begitu banyak hamba-hamba Tuhan sudah terlibat dalam politik khususnya politik praktis, dengan melihat kenyataan ini apakah memang juga panggilan hamba Tuhan dalam melayani umat boleh juga terlibat langsung dengan urusan parlemen atau Negara dan apakah mereka yang sudah terlibat sudah menjadi garam dan terang ditengah-tengah kegelapan atau karena terlibatnya didalam dunia politik maka justru panggilannya sebagai hamba Tuhan sudah tidak jelas, dilematis inilah yang akan dibahas dalam tesis ini. Dimana penulis akan mengkaji sejauh mana Sejarah perpolitikan yang terjadi didalam dunia dan sejauh mana Alkitab memberi informasi mengenai keterlibatan para hamba-Nya dalam politik. Penulis akan meninjaunya secara etis.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Politik

Kata politik menurut Aristoteles berarti pengetahuan tentang kota, dan yang dimaksud dengan kota adalah Negara kota, yaitu bentuk ideal dari komunitas manusia yang secara alami dikondisikan dan mengekspresikan diri guna memenuhi kebutuhan hidup bersama, sebagaimana diungkapkan oleh Paul Lehmann "Politics is the science of polis although concretely it is the city-state, is always also the ideal form of human association which is by nature the precondition for and the expression of the fulfillment of human life.

2.2. Sistem Politik

Sistem Politik adalah berbagai macam kegiatan dan proses dari struktur dan fungsi yang bekerja dalam suatu unit atau kesatuan (masyarakat/negara). Menurut Drs. Sukarno, sistem politik adalah sekumpulan pendapat, prinsip, yang membentuk satu kesatuan yang berhubungan satu sama lain untuk mengatur pemerintahan serta melaksanakan dan mempertahankan kekuasaan dengan cara mengatur individu atau kelompok individu satu sama lain atau dengan Negara dan hubungan Negara dengan Negara.

2.3. SEJARAH PERKEMBANGAN POLITIK

Sokrates adalah salah seorang yang merupakan tokoh utama, walaupun tidak yang pertama, dimasa Yunani kuno itu yang mengarahkan perhatiannya kepada masalah-masalah bermasyarakat dan bernegara. Sokrates dikenal sebagai seorang filsuf yang kuat fisiknya dan sehat jasmaninya, mampu menghadapi berbagai rintangan hidup, baik ketika ia harus maju ke medan perang demi membaktikan dirinya untuk Athena, maupun ketika ia terjun ke lapangan politik dan mencurahkan perhatiannya semata-mata kepada pemikiran-pemikiran masalah yang berhubungan dengan masyarakat, seperti dikemukakan oleh Deliar Noer :

3. METODE

Penulisan Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (Library research), observasi lapangan dan metode analisis deskriptif. Analisis artinya menguraikan pokok bagian dan bagian itu sendiri serta menghubungkan antara bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti dari keseluruhan (Muhamad Nasir, 1998: 43). Dikatakan deskriptif karena penulisan ini hanya memaparkan apa adanya, serta penulisan menggunakan wawancara dari masyarakat yang ada.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Situasi politik di Indonesia menjadi point yang penting untuk bab ini, oleh karena memang tulisan ini telah mengerucut kepada satu skop yang lebih sempit sesuai dengan judul di atas. Implikasi ini hanya melihat dan menganalisis konteks politik di Indonesia guna memberikan sebuah pertimbangan etis kepada setiap hamba Tuhan di Indonesia akan boleh-tidaknya untuk aktif sebagai politisi di lingkup pemerintahan (terlibat dalam politik praktis).

Kompasiana.com mengutip pernyataan Eirene Yulian Adelin dengan mengemukakan kondisi politik di Indonesia masa kini sebagai berikut:

Sekarang ini keadaan politik di Indonesia tidak seperti yang diinginkan. Banyak rakyat beranggapan bahwa politik di Indonesia adalah sesuatu yang hanya mementingkan dan merebut kekuasaan dengan menghalalkan segala cara. Pemerintah Indonesia pun tidak mampu menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat. Hal ini ditunjukkan oleh sebagian rakyat yang mengeluh, karena hidup mereka belum dapat disejahterakan oleh negara. Pandangan masyarakat terhadap politik itu sendiri menjadi buruk, dikarenakan pemerintah Indonesia yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai wakil rakyat dengan baik. Bagi mereka politik hanyalah sesuatu yang buruk dalam mencapai kekuasaan.

Hal yang senada juga dikemukakan oleh seorang pengamat politik, Yudi Latief. Seperti yang dikutip oleh Lensa Indonesia.com, Yudi Latief berkata: "Bangsa ini rusak karena banyaknya orang pintar yang tidak mempunyai kebijaksanaan. Mereka menggunakan kemampuan ilmunya demi uang". Artinya, bahwa politikus Indonesia sekarang memang sudah tidak memiliki etika yang baik dalam berpolitik. Bahkan Yudi Latief menegaskan argumentasinya di atas dengan mengatakan, "saat ini banyak aktivis politik yang bekerja memperdagangkan ilmu politiknya untuk kepentingan pribadi dan mengabaikan kepentingan masyarakat banyak".

Seperti yang dicantumkan oleh Kompas.com, Peneliti senior Burhanuddin Muhtadi mengatakan, dari temuan Lembaga Survei Indonesia (LSI) selama 1-12 Februari 2012, secara umum menunjukkan kondisi politik nasional mengalami keterpurukan. Dalam survei itu, responden diminta pendapatnya mengenai kondisi politik di Indonesia. LSI mencatat, hanya 20,9 persen responden yang menyatakan situasi perpolitikan Indonesia berada dalam kondisi baik, adapun 2,0 persen lainnya menilai sangat baik, dan 34,2 persen menyatakan sedang atau normatif. Sementara itu, jumlah responden yang melihat kondisi politik Indonesia kini memburuk mencapai 27 persen, sangat buruk 6,8 persen, dan jawaban tidak tahu kondisi politik mencapai 9,0 persen.

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh LSI di atas, maka Burhanudin Muhtadi mengatakan, "Penilaian rakyat atas kondisi politik nasional secara umum saat survei dilakukan menunjukan lebih banyak yang mengatakan buruk atau sangat buruk dibanding mengatakan sebaliknya, baik atau sangat baik".

5. KESIMPULAN

Berdasarkan tema utama dari tulisan ini, yakni: problematika keterlibatan hamba Tuhan dalam politik praktis setelah melalui pembahasan yang panjang-lebar, maka berikut ini penulis akan mengemukakan beberapa kesimpulan etis secara alkitabiah. Berdasarkan analisis penulis terhadap kesaksian Alkitab (Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru) tentang topik ini maka penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

Pertama, hamba Tuhan tidak boleh terlibat dalam politik praktis, apapun alasannya. Mengapa? Apabila kembali melihat dalam Perjanjian Lama, semua raja dalam kerajaan monarki-teokrasi gagal dalam menjalankan politik teokrasi. Untuk mengerti dan mengetahui bagaimana politik teokrasi dalam Perjanjian Lama lihat pembahasan dalam bab III. Meskipun juga ada beberapa tokoh dalam Perjanjian Lama yang dapat menjalankan politik yang dikehendaki oleh Tuhan, seperti: Daniel dan teman-temannya, Ester, Mordekhai, dan Yusuf. Akan tetapi, hal ini tetap tidak boleh menjadi tolak ukur yang mutlak guna melegalkan hamba Tuhan terlibat dalam politik praktis. Oleh karena raja-raja yang gagal jumlahnya tidak lebih sedikit dari tokoh-tokoh yang relatif berhasil di atas. Mayoritas raja-raja di atas gagal oleh karena tidak dapat bertahan dalam godaan politik dunia yang sangat menggiurkan, seperti: masalah kekuasaan, masalah perempuan, masalah kesombongan, masalah harta, dan masalah penyembahan berhala.

Kedua, hamba Tuhan tidak boleh terlibat dalam politik oleh karena Tuhan Yesus sendiri tidak pernah mau menerima kerajaan dunia. Meskipun Tuhan Yesus tetap memberikan perintah bahwa setiap orang Kristen wajib untuk menghormati pemerintah. Namun Tuhan Yesus tidak menyuruh hamba Tuhan untuk menjadi politikus, meskipun pemerintah berasal juga berasal dari Tuhan. Ketika Iblis menawarkan kerajaan dunia kepada Tuhan Yesus, Dia menolaknya. Hal ini mengindikasikan bahwa kerajaan dunia memang sudah berada di bawah intimidasi dari kuasa Iblis.

Ketiga, hamba Tuhan tidak boleh terlibat dalam politik praktis oleh karena panggilan hamba Tuhan adalah menjadi pejabat dalam Kerajaan Allah yang diwakili oleh gereja. Tuhan memanggil setiap hamba Tuhan dengan panggilan khusus. Ketika ibu dari Yakobus dan Yohanes datang kepada Tuhan Yesus dan memohon supaya kedua anaknya, yakni: Yakobus dan Yohanes diberikan jabatan yang tinggi dalam kerajaan Kristus; maka Tuhan Yesus menjawab dengan menjelaskan bahwa untuk memperoleh kemuliaan tersebut mereka harus turut menderita bersama-sama dengan Kristus. Apakah ini berarti mereka juga akan disalibkan dengan Tuhan Yesus? Tentu tidak. Maksud dari pernyataan ini adalah mereka harus memberitakan Injil. Meskipun mereka harus menderita karena pemberitaan Injil, akan tetapi hal itulah yang memang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan mereka. Hal inilah yang hamba Tuhan harus pegang sebagai sebuah prinsip dalam menjalankan tugas dan pelayanan.

Keempat, Tuhan Yesus sebelum naik ke Sorga, Dia memberikan Amanat Agung untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus. Dan untuk melakukan hal itu, hamba Tuhan harus pergi memberitakan Injil, membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, serta mengajarkan tentang Firman Tuhan kepada mereka. Dalam konteks ini, Tuhan Yesus tidak pernah memberikan perintah bahwa untuk menjadikan semua bangsa menjadi murid-Nya, maka hamba Tuhan harus menjadi politikus. Sehingga tidak ada alasan bagi setiap hamba Tuhan untuk melibatkan diri dalam politik praktis. Oleh karena dalam status sebagai hamba Tuhan maka politik menjadi haram hukumnya bagi mereka.

Kelima, hamba Tuhan tidak boleh terlibat dalam politik praktis oleh karena pasti mereka akan diperhadapkan dengan banyak konflik dalam mengambil keputusan etis dan alkitabiah. Seperti yang sudah dijelaskan dalam Bab IV, konflik-konflik tersebut seperti: konflik tanggungjawab, konflik panggilan, dan konflik dogmatis-pragmatis. Berdasarkan pertimbangan konflik-konflik di atas, maka disimpulkan bahwa hamba Tuhan tetap tidak boleh untuk menjadi politikus.

Keenam, apabila memang ada hamba Tuhan tetap bernafsu untuk terlibat dalam politik praktis, maka dia harus memilih. Dalam arti, kalau memang dia mau menjadi politikus maka hamba Tuhan tersebut harus meninggalkan atau melepaskan jabatannya sebagai hamba Tuhan baik itu pendeta, gembala sidang, penatua, atau diaken). Begitu juga sebaliknya. Hal ini penting, oleh karena tentu tidak mungkin dapat mensinergikan tugas politik dengan tugas pelayanan. Kedua hal ini tentu tidak sama atau saling bertentangan. Politik identik dengan kekuasaan, jabatan, kebohongan, kepura-puraan, dan lain-lain. Sedangkan pelayanan identik dengan pengabdian, ketulusan, kejujuran, kasih, damai sejahtera, kelemahlembutan, penguasaan diri, kesopanan, keadilan, dan lain-lain.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Alkitab. (2000) Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia
- Baker L. Eva, Popham James, (1981). Bagaimana Mengajar Sistematis, Yogyakarta: KANISIUS
- Collins M. Mallary, Fontenelle H. Don, (1992). Mengubah Perilaku Siswa Pendekatan Positif, Jakarta: BPK Gunung Mulia
- Dobson James. (2004). Berani Menerapkan Disiplin, Interaksa: Batam centre
- _____, (1970). Berani Mendisiplin, Jepara: Silas Press
- Dodson Fitzhugh, (2006). Mendisiplinkan anak dengan kasih sayang, Jakarta: Gunung Mulia
- Fantenelle. H Don, Kollins, M. Mallary, (1992). Mengubah perilaku siswa, Jakarta: BPK Gunung Mulia
- Gunarsa D. Singgih Yulia, Gunarsa D. Singgih, (1986). Psikologi Perkembangan anak dan Remaja, Jakarta: BPK Gunung Mulia
- _____, (1992). Psikologi untuk Membimbing, Jakarta: BPK Gunung Mulia
- HP. Novita, (2008). Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Surakarta: Bringin 55Solo
- Musbikin Imam, (2005). Mendidik Anak Nakal, Yogyakarta: Mitra Pustaka
- Nasir, Muhamad, (1998). Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Kresnowiati Winni, Anugrah Dadan, (2008). Komunikasi Antar Budaya, Jakarta: Jalan Permata
- Lindzey Gardner, Hall, S. Calvin (1993). Teori-teori Sifat dan Behavioristik. Yogyakarta: KANISIUS
- Kosasi Rafli, Soecipto, (2004). Profesi Keguruan, Jakarta: Rineka Cipta
- Kasan Tholib, (2009). Dasar-dasar Pendidikan, Jakarta: Studia Press
- Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia, (1989). Strategi Pendidikan Kristen di Indonesia, Jakarta: BPK Gunung Mulia
- Priska. Wawancara, Kayuara 29 Januari 2013
- Step. Yakobus Idas. Wawancara, Kayuara 26 November 2012
- Yostina. S. Wawancara, Kayuara 31 Januari 2013
- Sidjabat, B. S, (2000). Menjadi Guru Profesional, Bandung: Yayasan Kalam Hidup
- _____, (2008). Membesarkan Anak Dengan Kreatif, Yogyakarta: ANDI
- Setiawani Go Mary, (2000). Menerobos Dunia Anak, Bandung: Yayasan Kalam Hidup
- Suwando, Candra. (2007). Karakter Keindahan Sejati Diri Manusia, Jakarta: Metanoia
- Sanjaya Wina, (2009). Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, Jakarta: Predana Media Group
- Schaefer Charles, (1996). Mendidik dan Mendisiplinkan Anak, Jakarta: Mitra Utama
- Rusyan Tabrani A, Wijaya Cece, (1992). Kemampuan Dasar Guru dalam Proses Belajar-Mengajar, PT. Remaja Rosdakarya
- Tong Stephen, (1995). Seni Membentuk Karakter Kristen, Jakarta: LRII
- _____, (1992). Dosa Keadilan dan Penghakiman, Jakarta: LRII
- _____, Setiawani Mary, (1995). Seni Membentuk Karakter Kristen, Jakarta: LRII
- Tobias Ulrich Cynthia, (2009). Setiap Anak Bisa Berhasil, Jakarta: Pionir Jaya
- Tim Penyusun KBBI, (1991). Jakarta: Balai Pustaka
- _____, (2003). Jakarta: Balai Pustaka